

PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

(Studi di Direktorat Reserse Narkoba POLDA JATIM)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**RIZKY PAMELLA HERMAWAN
NIM. 105010101111075**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLRI**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Rizky Pamella Hermawan**

b. NIM : **105010101111075**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Ismail Navianto, SH.MH
NIP. 19550212 19850 3 1003

Pembimbing Pendamping

Alfons Zakaria, SH.LLM.
NIP. 19800629 20050 1 1002

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.M.Hum
NIP. 19590406 198601 001

**PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI**

RIZKY PAMELLA HERMAWAN, Dr. Ismail Navianto, SH.MH,

Alfons Zakaria, SH.LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Pamellahermawan@gmail.com

Abstraksi

Penyebab terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah Polda Jatim dari perspektif kriminologis antara lain yang pertama adalah karena alasan ekonomi, karena keadaan ekonomi yang lemah mereka cenderung mengambil keuntungan dari menjual narkotika sebagai tambahan hasil, alasan yang kedua yaitu adalah alasan lingkungan. Anggota polri sering terjun langsung dalam komunitas pengguna saat melakukan penyamaran, dan dari alasan itulah mereka cenderung lebih mudah terpengaruh untuk ingin mencoba masuk dalam dunia seperti itu dan mulai mencoba menggunakan narkotika.

Abstract

Narcotics cause of the criminal act committed by members of the police in the region of East Java Police criminological perspective, among others, the first is due to economic reasons, because of their weak economic conditions are likely to take advantage of selling narcotics in addition to the results, the second reason is environmental reasons. Members of the police are often involved directly in the user community while undercover, and of the reason why they tend to be more susceptible to want to try to enter the world as it is and start trying to use narcotics.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai tanpa pandang bulu.

Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polri merupakan alat Negara sebagai alat penegak hukum. Yang dimana Polri dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku

dan selalu memegang teguh kode etik profesi Kepolisian.¹ Seperti halnya dalam suatu tindak pidana narkoba. Dapat di ketahui bahwa Pada saat ini narkoba sudah menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang dimana dengan sangat mudahnya peredarannya narkoba masuk di berbagai kalangan tidak mengenal apakah itu anak-anak, remaja dan dewasa yang berpotensi sebagai pelajar, mahasiswa, swasta/sipil, pejabat pemerintah melainkan sudah masuk dan mempengaruhi beberapa dari aparat penegak hukum yaitu anggota Polri.

Dewasa ini institusi Kepolisian terutama dalam hal penegakan hukum mendapat banyak tantangan dan ujian, salah satunya yaitu berkenaan dengan penegakan hukum pada tindak pidana narkoba dimana dalam penegakan hukum ini penyidik Kepolisian menangani kasus yang tersangkanya adalah anggota Kepolisian. Kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polri yang berkaitan dengan narkoba. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkoba sangat fatal apabila terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana narkoba.

^{1 1} Dr. Sadjijono,SH,M.Hum, **Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance**, Laksbang Meditama, 2008, Surabaya Hlm. 90

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri seperti yang telah disebutkan pada latar belakang, muncul beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai perumusan masalah yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri?
2. Apa upaya Ditreskoba Polda Jatim dalam menangani Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang di fokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Data diperoleh dari hasil penelitian dan/ atau narasumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Data berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dikaji untuk memberikan informasi serta data yang terkait dengan permasalahan.

Metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan) dari data tersebut dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan

yang ada dianalisa sesuai kerangka teori dan hasil penelitian yang dilakukan, maka analisis tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang ada.²

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Lokasi Penelitian

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu lembaga yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Polri juga bertugas menjaga seluruh keamanan seluruh wilayah hukum Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki markas besar yang menjadi pusat komando Kepolisian diseluruh Indonesia yang disebut Markas Besar Polri (Mabes Polri) berada di Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kesatuan yang tersebar di seluruh daerah propinsi di Indonesia yang bertanggung jawab atau berwenang atas wilayah hukum daripada propinsi tersebut yang disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda). Salah satu kesatuan setingkat Polda tersebut adalah Polda Jatim yang berkedudukan/ berada di Surabaya (Ibu Kota Propinsi Jawa Timur). Kepolisian

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) Surabaya berlokasi di jalan Achmad Yani Nomor 116 Surabaya.

b. Realita Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Polri di Polda Jatim

Direktorat reserse narkoba Polda Jatim memiliki banyak anggota. Dari seluruh anggota tersebut mempunyai kepribadian masing-masing antara satu dengan yang lainnya. dari sekian banyak anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim ini diperlukan pengawasan yang optimal juga dari pimpinan, tidak mudah melakukan pengawasan kepada semua anggotanya jika tidak ada kerjasama yang baik didalamnya. Dalam hal ini pimpinan sudah melakukan pengawasan terhadap masing-masing anggotanya bahkan dilakukan pengawasan yang melekat, diharapkan bahwa setiap anggota baik itu dilingkungan dinas maupun di lapangan dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik institusi dan merugikan diri sendiri.

Pada umumnya secara keseluruhan penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

1. Alasan Internal dari Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut.

a. Kurangnya rasa pengendalian diri

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang, sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong seseorang untuk memiliki atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak Ingin merasakan kebebasan berperilaku tanpa dibatasi oleh norma-norma yang ada.

Sifat ini adalah juga merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

- c. Keadaan jiwa/psikis yang labil sehingga dengan mudah terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Hal ini sebelumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadap/diatasnya.dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka dia dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

- d. Adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana narkoba.

2. Alasan Eksternal dari Pelaku

Alasan yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah berikut ini.

- a. Kurangnya penghasilan sehingga mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik

maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi baik dapat mempercepat memenuhi keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

b. Pergaulan/Lingkungan yang memberikan pengaruh negatif

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya

Berdasar pada hasil wawancara dengan responden yang tidak ingin disebutkan identitasnya—namun penulis menggunakan teknik

anonimitas responden dalam penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian datanya—menyatakan bahwa:

“ Saya makai narkoba mulanya karena kenal sama orang yang jual narkoba . nah, kebetulan saya punya temen yang cari barang begituan, jadinya saya ambil barang di temen saya yang jual tadi sekalian ambil untung harga dari situ. Sembari saya jual saya juga dikasi jatah buat sekedar memakai, jarang jarang kan bisa makai gratis. “

c. Mudahnya mendapatkan narkoba

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum.

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk

dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit dengan keadaan sosial maka narkoba dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat sebagai pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Mengenai penyebab terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri yaitu mereka rata-rata melakukan Tindak Pidana Narkoba karena 4 alasan, yaitu :

1. Alasan pribadi

Di dalam alasan pribadi terdapat beberapa dorongan-dorongan yang timbul di dalam dirinya antara lain:

a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku.

Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkoba dikalangan Kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan akibat dari adanya rasa penasaran dengancara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama yaitu dengan mencoba menggunaka narkoba.

Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polri yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkoba) tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut.

b. Mengatasi stres

Stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang menyebabkan anggota polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan.

Dengan banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalahgunaan narkoba bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkoba di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif.

2. Alasan lingkungan

a. Lingkungan Keluarga

Alasan tersebut dapat berupa alasan psikologis, pekerjaan, organ biologis dan sosial budaya. Alasan keluarga merupakan alasan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Didalam lingkungan keluarga ini dibutuhkan suatu

pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota 81 keluarga. Dimaksudkan agar didalam suatu keluarga tidak terjadi konflik maupun hal-hal yang akan membuat salah satu dari anggota keluarga tersebut melakukan suatu perbuatan negatif akibat salahnya bimbingan dan pengawasan maupun kurangnya perhatian dari keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga yang tidak mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta perhatian kepada sesama anggota keluarga maka segala tindakanyang dilakukan salah satu dari anggota keluarga tersebut merasa tindakan yang ia lakukan aman-aman saja dan tidak memikirkan apakah itu baik atautkah buruk kedepan baginya. Maka dari keluargalah perlu ditanamkan suatu nilai-nilai dan norma-norma sebagai bekal bagi seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota Polri merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang anggota Polri seperti perbuatan menyalahgunakan narkoba maupun mengedarkan narkoba. Sebagian besar keluarga dari anggota Polri yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan

perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar karena pada saat ini anggota Polri banyak tersandung masalah hukum sebagai contoh yaitu dalam hal tindak pidana narkoba.

b. Lingkungan masyarakat

Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Seseorang melakukan suatu tindakan negatif atau kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba.

2. Alasan Mudah Didapatkan

Alasan mudah di dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkoba bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkoba. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkoba, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna narkoba tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkoba.

Seperti diketahui bahwa Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas Polisi. Oleh

karena itu Polisi melakukan upaya-upaya dalam menangani Tindak Pidana narkotika oleh Anggota Polri.

1. Pre-emptif (Pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika, Contoh langkah yang di ambil ialah dengan diadakannya tes urine

- a. Peranan hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika sangat penting dalam pembuktian khususnya bagi pengguna. Seseorang yang ada pada sampel urine dinyatakan positive mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses karena dia telah memakai narkotika dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses di pengadilan dan dijadikan sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan hukum yang berlaku. Penerapan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika telah diterapkan

untuk menentukan pengguna narkoba untuk menjadikannya tersangka.

Karena hasil Tes Urine tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana narkoba sesuai yang diatur dalam undang-undang 35 Tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkoba yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urine dan ditetapkan sebagai tersangka. Hasil tes urine ini sangat berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut undang-undang yang telah diatur dalam menentukan bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba.³ Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada anggota Polri tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Narkoba penerapannya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan secara aktif tentang bahaya Narkoba, sehingga dapat mengerti tentang dampak negatif dari tindak Pidana Narkoba.

- b. Dalam menangani Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri, Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yaitu memberikan penyuluhan agama agar

³ Yudi Kiswanto Syarif, **Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, FAKultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

setiap anggotanya memiliki iman yang kuat dan tidak melanggar norma Agama, Penyuluhan tentang Narkoba selama 2x seminggu berupa penyuluhan tentang narkoba, dan memberikan tontonan film yang berisi tentang dampak-dampak negatif dari Tindak Pidana Narkotika.⁴

2. Preventif (Pencegahan)

Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya. Langkah ini bentuknya adalah:

- a) Melakukan kerjasama antar sesama anggota Polri untuk mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalur peredaran narkoba
- b) Anggota-anggota Polri diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba, juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.

3. Represif (Penindakan)

⁴ Yudi Kiswanto Syarif, **Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, FAKultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat jera para pelaku tindak pidana narkoba.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 2 (dua) pokok permasalahan di atas, diuraikan di bawah ini:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah Polda Jatim antara lain yang pertama adalah karena alasan ekonomi, karena keadaan ekonomi yang lemah mereka cenderung mengambil keuntungan dari menjual narkoba sebagai tambahan hasil, alasan yang kedua yaitu adalah alasan lingkungan. Anggota Polri sering terjun langsung dalam komunitas pengguna saat melakukan penyamaran, dan dari alasan itulah mereka cenderung lebih mudah terpengaruh untuk ingin mencoba masuk dalam dunia seperti itu dan menggunakan narkoba.

2. Upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dalam menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri.

- a. Pre-emptif (Pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan alasan peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika.

- b. Preventif (Pencegahan)

Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya.

- c. Represif (Penindakan)

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai

tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat jera para pelaku tindak , pidana narkoba.⁵

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka peneliti merekomendasikan saran-saran yang dapat berguna bagi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim:

1. Memeberikan penyuluhan kepadaseluruh anggota akan bahayanya melakukan Tindak Pidana NArkotika serta dampak dari perbuatan apabila melakukannya.
2. Agar tindak pidana narkoba tidak terjadi lagi di kalangan anggota Polri perlu sering mengadakan pengawasan terhadap anggotanya, berupa pengawasan saat melakukan penyamaran saat anggota Polri harus terjun langsung dalam komunitas pengguna narkoba guna memperoleh informasi maupun sasaran.
3. Memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba, karena selain merusak nama baik diri sendiri mereka juga merusak nama baik Institusi Kepolisian

⁵ Wawancara dengan Kompol. Pulungan Kasubbagremin Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada Tanggal 20 Agustus 2014

